

THE  NDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

POLICY ASSESSMENT 2026

Diskursus Elite Partai Politik dan Persepsi Masyarakat terkait Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD



Presented By **Arfianto Purbolaksono**, Research Associate
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Mengapa Isu Ini Penting?

Latar Belakang Munculnya Wacana Pilkada Melalui DPRD

Biaya Politik



Biaya politik semakin tinggi. Pilkada langsung membutuhkan dana besar, mendorong praktik politik uang yang melemahkan kualitas demokrasi lokal di berbagai daerah.

Integritas



Banyak kepala daerah terkena OTT KPK. Politik uang masih marak terjadi. Wacana Pilkada melalui DPRD kembali muncul sejak akhir 2025 sebagai respons atas persoalan ini.

Regulasi



Pemerintah dan DPR mulai membahas revisi UU Pemilu. Pertanyaan kunci: apakah mengubah mekanisme pemilihan akan menyelesaikan persoalan demokrasi lokal?

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat sejak akhir 2025, dipicu oleh tingginya biaya politik, maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah, dan masih meluasnya praktik politik uang. Diskursus ini mendorong pemerintah dan DPR untuk mulai membahas revisi Undang-Undang Pemilu sebagai bagian dari upaya reformasi sistem demokrasi lokal di Indonesia.



Tujuan Kajian



Lima Pertanyaan Utama Penelitian



Pertanyaan Penelitian

- ✓ Bagaimana sikap elite politik terhadap wacana Pilkada melalui DPRD?
- ✓ Bagaimana persepsi masyarakat terhadap perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah?
- ✓ Apa dampaknya terhadap legitimasi politik kepala daerah yang terpilih?
- ✓ Apa dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal di Indonesia?
- ✓ Apa rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan?

01 Sikap Elite Politik

Mengidentifikasi dan memetakan posisi serta argumen elite partai politik terkait wacana Pilkada melalui DPRD, termasuk partai pendukung dan penolak.

02 Persepsi Masyarakat

Menganalisis data survei nasional untuk memahami pandangan publik terhadap perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke DPRD.

03 Rekomendasi Kebijakan

Merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk menjawab tantangan demokrasi lokal, legitimasi politik, dan akuntabilitas kepala daerah di Indonesia.





* Kerangka Berpikir

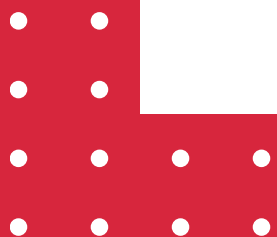
Legitimasi Politik (Harfst & Wiesner)

Legitimasi Formal

- ✓ Sesuai aturan
 - ✓ Legal
 - ✓ Prosedural
- Tidak selalu diterima masyarakat

Legitimasi Empiris

- ✓ Dipercaya masyarakat
 - ✓ Memperoleh dukungan publik
 - ✓ Diterima warga
- "Demokrasi membutuhkan keduanya"



Metodologi Penelitian

Pendekatan dan Metode Kajian



Pendekatan & Metode

Pendekatan: Kualitatif – mengeksplorasi secara mendalam sikap elite politik dan persepsi masyarakat terhadap wacana Pilkada melalui DPRD.

Metode: Deskriptif Analitis – mendeskripsikan fenomena secara sistematis berdasarkan data empiris dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan.

Analisis Data:

- ✓ Reduksi Data – menyaring informasi relevan dari berbagai sumber
- ✓ Kategorisasi – mengelompokkan data berdasarkan tema dan pola
- ✓ Interpretasi – menarik makna dan kesimpulan dari temuan

Sumber Data

Survei Nasional (Litbang Kompas, Populi Center, LSI Denny JA), pemberitaan Media massa, Dokumen resmi Partai Politik, Literatur akademik terkait demokrasi lokal, serta Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fokus Kajian

Sikap elite partai politik terhadap wacana Pilkada DPRD, persepsi masyarakat umum, dampak terhadap legitimasi politik, serta implikasi bagi kualitas demokrasi lokal di Indonesia pasca-2024.

Alur Analisis

Pengumpulan Data → Reduksi & Seleksi → Kategorisasi Tema → Interpretasi Temuan → Rekomendasi Kebijakan. Proses ini memastikan validitas dan relevansi setiap kesimpulan yang dihasilkan.



Peta Sikap Elite Politik

Posisi Partai terhadap Pilkada Melalui DPRD

Mendukung Pilkada DPRD

Golkar, Gerindra, PAN, PKB, NasDem, Demokrat

- Efisiensi anggaran negara
- Biaya politik lebih rendah
- Konflik sosial berkurang
- Stabilitas pemerintahan daerah

Menolak Pilkada DPRD

PDIP

- Demokrasi langsung adalah hak rakyat
 - Kedaulatan rakyat tidak boleh dikurangi
 - Hak memilih adalah hak konstitusional
- PKS – Belum menentukan sikap





Dua Perspektif yang Saling Bertentangan

Elite yang mendukung menekankan efisiensi dan pengurangan biaya politik, sementara yang menolak menekankan hak rakyat dan kedaulatan demokratis. Ketegangan ini mencerminkan perdebatan mendasar tentang nilai demokrasi.



Sikap Masyarakat

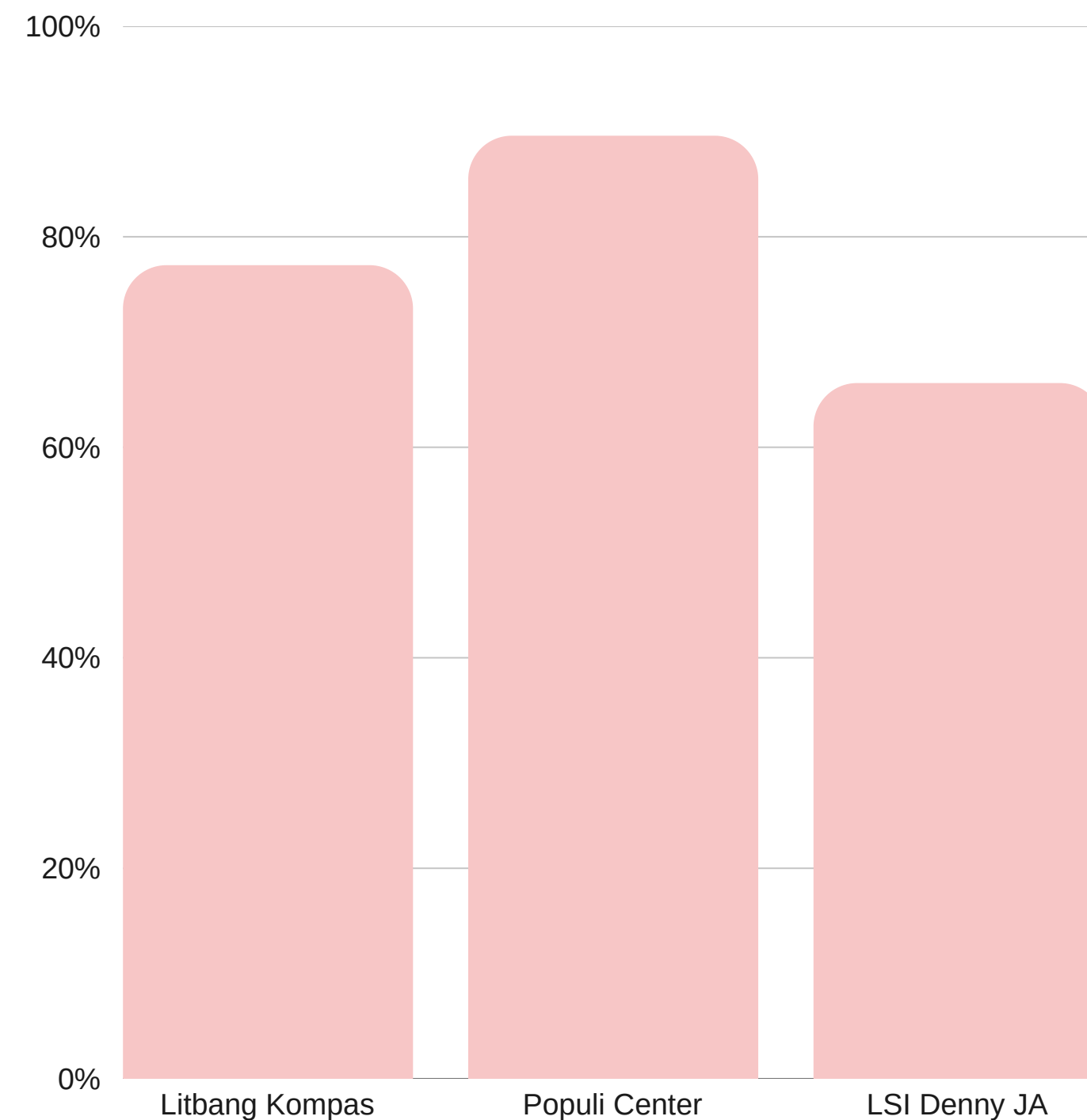
Mayoritas Publik Menolak Pilkada Melalui DPRD

Gen Z 84% Menolak Pilkada DPRD

Tiga lembaga survei menunjukkan penolakan mayoritas publik terhadap wacana Pilkada melalui DPRD:

- Litbang Kompas: 77,3% menolak
- Populi Center: 89,6% menolak
- LSI Denny JA: 66,1% menolak

Data ini mencerminkan bahwa masyarakat masih menginginkan hak memilih langsung kepala daerah mereka.



Source: AI-generated data. Replace or verify before use.



Gap antara Elite dan Publik

Persepsi yang Berbeda tentang Pilkada DPRD

Elite Politik → Efisiensi

Elite partai politik cenderung membahas isu efisiensi: pengurangan biaya politik, stabilitas pemerintahan, dan kontrol partai sebagai argumen utama mendukung Pilkada melalui DPRD.

Masyarakat → Partisipasi

Mayoritas publik justru menekankan hak memilih, kedaulatan rakyat, dan legitimasi demokratis. Terjadi gap persepsi yang signifikan antara elite dan masyarakat.

⚠ Kesimpulan: Terjadi gap persepsi antara elite dan publik.



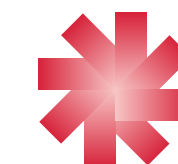


Benarkah Pilkada DPRD Mengurangi Korupsi?

Analisis Kritis terhadap Asumsi Antikorupsi



BELUM TENTU



- ✓ Korupsi dipengaruhi oleh Pengawasan, Integritas, dan Patronase – bukan semata mekanisme pemilihan.
- ✓ Mengubah sistem pilkada tidak otomatis menghilangkan praktik korupsi di daerah.
- ✓ Tanpa reformasi pengawasan dan integritas, korupsi hanya berpindah arena, bukan berkurang.
- ✓ Akar masalah: lemahnya akuntabilitas, budaya patronase, dan minimnya transparansi anggaran daerah.



Bukti Historis

Rekam Jejak Politik Uang di Era Pemilihan Tidak Langsung

Timeline: Tahun 2000 – Pilkada Melalui DPRD

- Tahun 2000: Kepala daerah dipilih oleh DPRD
- Politik uang marak terjadi di tingkat legislatif
- Praktik jual beli suara anggota DPRD meluas
- Karantina anggota DPRD menjelang pemilihan menjadi hal biasa
- Biaya politik mencapai miliaran rupiah untuk "membeli" suara dewan
- Korupsi tetap terjadi – bahkan berpindah ke arena legislatif

Kesimpulan Historis

"Korupsi tidak hilang. Korupsi hanya berpindah arena."

Pengalaman sejarah membuktikan bahwa mengubah mekanisme pemilihan tidak secara otomatis menghilangkan korupsi. Selama pengawasan lemah dan integritas rendah, korupsi akan terus ada dalam bentuk yang berbeda.





Implikasi terhadap Legitimasi Politik

Pilkada Langsung vs. Pilkada DPRD

Pilkada Langsung

- ✓ Mandat rakyat langsung dari pemilih
 - ✓ Akuntabilitas kepala daerah kepada publik
 - ✓ Kepercayaan masyarakat lebih tinggi
- Legitimasi tinggi: formal dan empiris terpenuhi

Pilkada DPRD

- ✓ Sah secara hukum dan prosedural
- Namun: berpotensi mengalami defisit legitimasi empiris
- Kepala daerah tidak memperoleh mandat langsung dari rakyat
- Kepercayaan publik dan dukungan masyarakat melemah



Dampak terhadap Demokrasi Lokal

Pilkada DPRD dan Rantai Dampak terhadap Kualitas Demokrasi



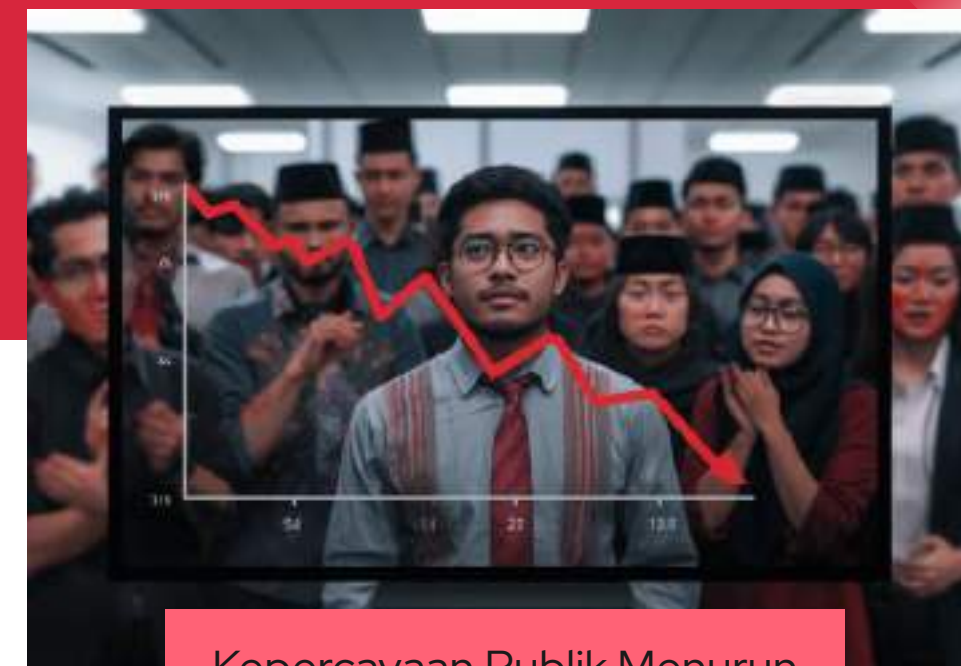
Partisipasi & Akuntabilitas

Pilkada DPRD → Partisipasi turun: Masyarakat kehilangan hak suara langsung. Akuntabilitas bergeser: Kepala daerah lebih bertanggung jawab kepada DPRD daripada rakyat.



Ketergantungan Elite & Patronase

Kepala daerah bergantung pada elite: Keputusan kebijakan dipengaruhi kepentingan partai. Patronase meningkat: Praktik politik transaksional semakin menguat di tingkat lokal.



Kepercayaan Publik Menurun

Kepercayaan publik menurun: Legitimasi empiris melemah. Demokrasi lokal kehilangan fondasi partisipatifnya dan rentan terhadap konsolidasi kekuasaan elite.

Temuan Utama

Ringkasan Temuan Penelitian Policy Assessment 2026

01



Elite Politik Terpolarisasi
Sebagian besar partai mendukung Pilkada via DPRD, sementara PDIP menolak dengan alasan kedaulatan rakyat dan hak demokrasi.

02



Mayoritas Publik Menolak
Pilkada DPRD
77–89% responden survei nasional menolak perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

03



Bukti historis menunjukkan korupsi tetap terjadi pada sistem DPRD. Korupsi ditentukan oleh pengawasan, integritas, dan patronase.

04 Legitimasi Politik Menjadi Isu Utama – Pilkada langsung menghasilkan legitimasi empiris yang kuat karena memperoleh mandat langsung dari rakyat. Pilkada melalui DPRD berisiko mengalami defisit legitimasi empiris meskipun sah secara hukum.



Policy Recommendation

6 Langkah Rekomendasi Kebijakan



Langkah 1 & 2

1. Pertahankan Pilkada Langsung sebagai mekanisme demokrasi yang memberikan mandat rakyat secara langsung.
2. Perbaiki Kualitas Pilkada melalui reformasi sistem pembiayaan kampanye dan penguatan regulasi.



Langkah 3 & 4

1. Perkuat Pengawasan Politik dengan memperkuat lembaga pengawas independen dan transparansi proses pemilihan.
2. Reformasi Internal Partai untuk mendorong kaderisasi yang demokratis dan akuntabel.



Langkah 5 & 6

1. Perluas Pendidikan Politik kepada masyarakat agar pemilih semakin cerdas dan kritis dalam berdemokrasi.
2. Libatkan Publik dalam Setiap Perubahan Kebijakan untuk memastikan legitimasi empiris yang kuat.



Terima Kasih

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research